

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH, PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**

**Muhamad Run
Muh. Amir
Muhammad Basri**

MuhamadRun@gmail.com

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Muhamad Run, C1A1 13 052, Judul penelitian pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara). Di bimbing oleh Muh. Amir selaku pembimbing I dan Muhammad Basri selaku pembimbing II . Latar belakang masalah fungsi BPD Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Demokratis. Dengan berlakunya pasal 1 ayat 6, Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bunyinya “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di desa Linsowu Kecamatan Kulisusu? Dan faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu?

Hasil penelitian pelaksanaan fungsi BPD Desa Linsowu dalam pemerintahan yakni BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk peraturan Desa, fungsi lain ialah pembentukan panitia pemilihan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, Fungsi lainnya pelaksanaan fungsi pembangunan dengan membentuk peraturan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari fungsi aspirasi yang kemudian fungsi aspirasi terdapat fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi mengayomi masyarakat. Hasil penelitian terahir faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Linsowu yang terdiri dari sumber daya BPD, mata pencaharian dimana mayoritas

anggota BPD di Desa Linsowu bekerja sebagai nelayan sehingga waktu untuk bekerja menyelesaikan tugasnya sangat sedikit, faktor lain menyangkut dana, dan kerja sama dengan Kepala Desa Linsowu turut mempengaruhi fungsi BPD, hal ini disebabkan adanya sikap arogansi dari Kepala Desa dalam memutuskan suatu.

Kata Kunci: Pelaksanaan fungsi, Pembangunan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang`

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan di berbagai bidang yang dilaksanakan di wilayah perkantoran dan pedesaan, telah berlangsung selama sejarah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Namun dalam proses pelaksanaan beserta hasil- hasil yang telah di capai, tampaknya mendapat sorotan dan tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga di sarankan perlunya dilakukan upaya redefinisi, rekonstruksi dan reformasi atas paradigma pembangunan nasional yang selama ini belum berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi secara maksimal. Demikian halnya dalam konteks pembangunan pedesaan, sehingga di harapkan partisipasi masyarakat yang terorganisir di dalam suatu lembaga pembangunan pedesaan seperti BPD.

Tujuan pembangunan Desa yang di maksud adalah menyusun perencanaan pembangunan yang dapat menciptakan suasana keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam rangka menumbuh kembangkan berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa harus mendapat perhatian yang telah serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten, maupun pemerintah Kecamatan dimana Desa tersebut berada.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Linsowu?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberi konstribusi bagi Pemerintah Desa dan warga masyarakat Desa Linsowu dalam menjalin hubungan dan kerja sama yang saling mendukung dan saling pengertian dalam membangun kehidupan sosial.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat.
3. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan perbandingan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengembangkan kajian lebih lanjut tentang keberadaan lembaga pembangunan pedesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Fungsi

Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Sehubungan dengan pengertian fungsi, Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, lahirlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif pada tataran pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Wijaya 2006, 35).

C. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Azimuty (2008), istilah pemerintahan berasal dari kata inggris "Government" dan *gouvernement* dari bahasa Prancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Gubernaculum* yang berarti kemudi, tetapi diterjemakan kedalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan terkadang juga menjadi penguasa. Pemerintahan juga menunjuk pada sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan menurut Siagian (2005 : 4-5) adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dan Negara.

Menurut Munawar (2006: 88) pembangunan dapat juga di definisikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik

berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Disini pemerintah juga dituntut untuk bisa menampung aspirasi masyarakat yang semakin berkualitas serta mengarahkan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. karena tanpa adanya bimbingan dan arahan dari pemerintah daerah maka potensi dan tenaga-tenaga masyarakat akan menjadi sia-sia belaka.

E. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera

Menurut Poerwadarmita (2012).Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

F. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

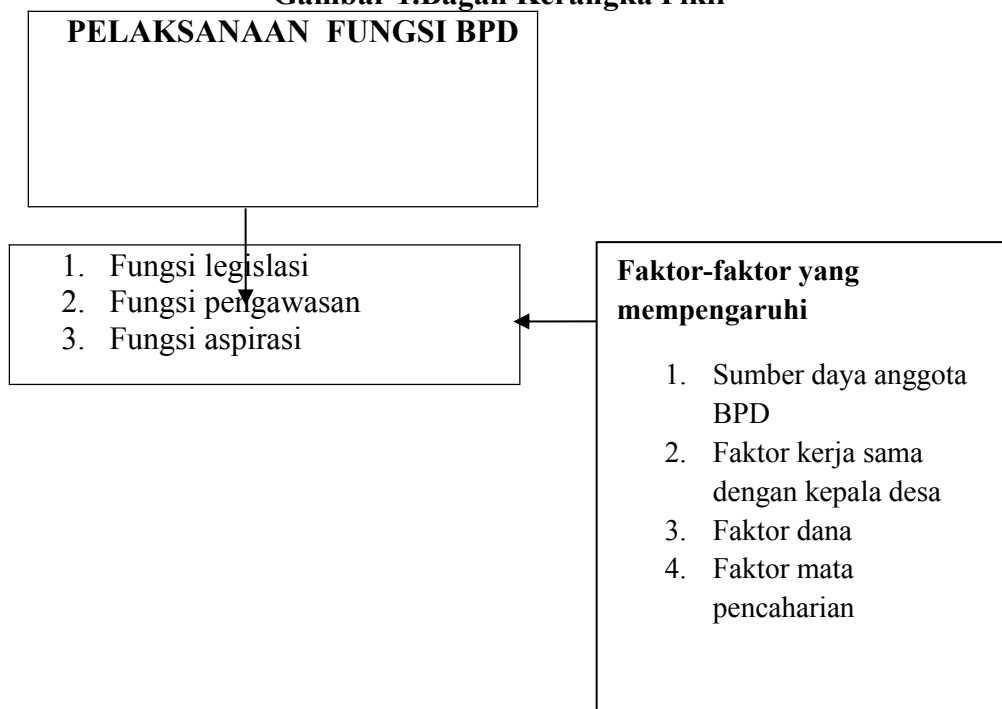
Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

G. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penelitian ini maka penelitian ini menggunakan kerangka konsep di bawah ini :

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasarkan pada pengamatan peneliti dari fungsi BPD agar bisa terlaksana dengan baik dan menjalin hubungan, kerja sama yang saling mendukung dan saling pengertian dalam pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan dalam membangun kehidupan sosial.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu terdiri dari kepala Desa Linsowu, Sekretaris, Ketua BPD , dan 2 orang tokoh masyarakat. Penetapan informan ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa keseluruhan informan tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan suatu desa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Linsowu.

Sejumlah informan penelitian ini melalui pengamatan dan wawancara. Sementara data sekunder yang dibutuhkan akan diperoleh melalui penelitian pustaka, yakni dengan melakukan penelusuran melalui berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, laporan hasil penelitian yang relevan, maupun data tertulis yang diterbitkan oleh lembaga instansi terkait

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan mengenai Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber daya yaitu informan penelitian melalui wawancara atau data kualitatif.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kantor Desa Linsowu dan instansi terkait lain yang relevan seperti profil desa, data kependudukan dan mata pencaharian penduduk serta data lainnya yang mendukung penelitian, khususnya yang berhubungan dengan angka-angka atau data kuantitatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik sebagai berikut:

1. Studi pustaka (library study), yakni melakukan penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis dimaksud.
2. Studi lapangan (field study), yakni penulis melakukan penelitian secara langsung dilapangan atau di lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian berikut ini:
 - a. Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berusaha mengikuti berbagai kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa bersama anggota BPD Desa linsowu dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

- b. Wawancara (interview) adalah melakukan wawancara pada informan yang mengetahui persis mengenai fungsi BPD dalam tugas pemerintahan Desa dan lembaga pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan menggunakan sifat wawancara terbuka.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berdasarkan kondisi obyektif dan aktual yang terjadi pada BPD Desa Linsowu sebagai mitra kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

F. Definisi Konsep

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di Desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2004:219)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah, Letak, Luas Dan Batas Wilayah Desa Linsowu

Desa Linsowu adalah salah satu desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang telah dibentuk pada tahun 1999 dan pada waktu itu Desa Linsowu masih masuk dalam wilayah Kabupaten Muna. Sebelum tahun 1976 Desa Linsowu adalah salah satu dusun yang berada dalam pemerintahan Desa Lemo yang saat ini yang sudah menjadi Kelurahan Lemo.

Pada tahun 1976 Desa Lipu dimekarkan salah satunya adalah Desa Lakonea dan Linsowu beralih kesalah satu dusun dalam Desa Lakonea . Pada tahun 1981 Desa Lakonea berubah status dari Desa Lakonea menjadi Kelurahan Lakonea dan Linsowu masuk salah satu lingkungan dalam wilayah pemerintahan Kelurahan Lakonea. Pada tanggal 23 Agustus 1999 bertempat di aula kantor Bappeda Kabupaten Muna Lingkungan Linsowu telah diresmikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang saat ini sudah masuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

2. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Desa Linsowu merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Kulisusu yang mempunyai luas Wilayah $\pm 8\text{km}^2$ dengan batas-batas wilayah adalah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wasalabose
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rombo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Kulisusu

b. Iklim

Iklim di desa linsowu sebagai mana di daerah–daerah lain di wilayah Indonesia mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau. Musim penghujan mulai dari bulan 11 – bulan 4, di musim ini adalah musim untuk bercocok tanam bagi yang membuka lahan pertanian. Sedangkan Musim kemarau yaitu mulai dari bulan 5 – bulan 10, pada musim ini masyarakatnya sebagian besar pergi melaut dari pada berkebun karena tanahnya tandus dan sangat tidak cocok untuk tanah pertanian.

3. Keadaan Social Budaya

Pada dasarnya kebudayaan itu adalah hasil manusia hidup bersama. Manusia dan kebudayaan adalah elemen yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Budaya dari masyarakat desa linsowu sampai sekarang masih dipegang teguh berdasarkan adat istiadat yang dianut oleh masing –masing warga masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada norma –norma yang telah disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan kebiasaan secara turun temurun. Desa linsowu dihuni oleh etnis/ suku buton kulisusu asli, serta memiliki budaya gotong royong (*Pengkawola*) yang masih melekat di kehidupan masyarakat. Selanjutnya desa linsowu memiliki cagar budaya yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik yaitu tari Lense, tari Balumpa dan tari Manca (Silat).

4. Keadaan Demografi

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah jiwa terbanyak di Desa Linsowu adalah 6-12 tahun yaitu sebanyak 127 jiwa atau 12,7% kemudian menyusul umur 18-22 tahun yaitu sebanyak 122 jiwa atau 12% dan golongan umur dengan jumlah terkecil adalah golongan umur 70 tahun keatas yaitu sebanyak 20 jiwa atau 2%.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penduduk desa Linsowu berjumlah 1.000 jiwa. Apabila ditinjau dari besarnya jumlah penduduk desa Linsowu berdasarkan jenis kelamin, maka ternyata bahwa jumlah perempuan lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Perempuan berjumlah 471 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 529 jiwa.

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Bahwa sebanyak 259 jiwa atau 38,8% penduduk Desa Linsowu telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan tingkat di atasnya, sedangkan jumlah pendidikan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan Sarjana yaitu 25 jiwa atau 3,7% dan tingkat Diploma dengan 5 jiwa atau 0,7%

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Linsowu masih perlu ditingkatkan agar sumber daya manusia dapat memadai dalam rangka meningkatkan kemakmuran daerah ini.

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Secara umum sumber mata pencaharian utama masyarakat di desa Linsowu berprofesi sebagai nelayan. Selain mempunyai keahlian kelautan, ada sebahagian beberapa profesi lainnya yang ditekuni oleh masyarakat Linsowu seperti berdagang dan tukang (pembuat perahu/kapal kayu dan bangunan rumah) yang dianggap sebagai pekerjaan sampingan untuk memperoleh penghasilan

tambahan dan sebagian kecil bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Linsowu

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan suatu keterkaitan kerja, yang menunjukkan adanya suatu unit kerja organisasi. Adanya hubungan segenap tugas pekerjaan satu dengan lainnya serta adanya hubungan wewenang dan tanggung jawab antar unit kerja.

C. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu

a. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. sebagai terwujudnya demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal sul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Dalam wilayah desa terdapat BPD yang dipilih dari calon- calon yang diusulkan dari kalangan adat , pemuka agama , organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan . BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa.

b. Pelaksanaan Fungsi pembangunan

Pembangunan desa adalah suatu strategis pembangunan yang dirangsang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, yaitu masyarakat yang kurang mampu dipedesaan. Karena pembangunan pedesaan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam pelaksanaan pembangunan dari tahun 2014 masih ada program kinerjanya yang belum terlaksana dikarenakan anggaran yang masuk hanya 34.000.000 ditahun 2014 dan semua tidak bisa menyelesaikan program kinerja yang akan dikerjakan adapun program yang dikerjakan hanya pembelian empat tower, dan pembelian gengset dua unit dan semua itu hanya untuk kepentingan masyarakat. namun ditahun 2015 program yang belum terlaksana, terlaksana pada tahun 2015 dengan anggaran 56.293.000, dengan program yang dilaksanakan pembuatan jalan tani, pembuatan sumur bor, renovasi mesjid atau pembuatan mck. Kemudian ditahun 2018 ini BPD akan merencanakan pembangunan desa menengah (RPJMDes)

c. Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

1. Fungsi aspirasi

Fungsi aspirasi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila BPD Desa Linsowu tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Dan besar kemungkinan program, berakibat fatal, karena masyarakat Desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program

perencanaan yang akan dilaksanakan, serta berakibat partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan dari Sangadi dan aparaturnya sebagai pelaksana perencana pembangunan yang telah mereka susun akan berjalan dan walaupun berjalan akan berjalan sendiri.

D. Faktor Yang Mempengaruhi

1. Sumber Daya Badan Permusyawaratan Desa

Untuk melaksanakan fungsi keterwakilan BPD diperlukan orang –orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya yang dikoordinasikan dengan pemerintah Desa. Permasalahan tingkat kualifikasi sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintah Desa, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para tokoh masyarakat Desa Linsowu mengatakkan :

“kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak berjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan Desa Linsowu”.(wawancara, Rizal, Februari 2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. BPD mempunyai peranan yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD merupakan wadah aspirasi masyarakat sekaligus merupakan wadah perencanaan , pelaksana dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan – badan lainnya dalam Pembangunan Didesa. Fungsi BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa ataupun BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun lisan pada saat pertemuan BPD atau pertemuan desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan atau rapat dibalai atau ditempat lain.
2. Faktor yang mempengaruhi, pendidikan atau sumber daya manusia anggota BPD, Desa Linsowu keterbatasan pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi anggota BPD Desa Linsowu, dalam melaksanakan tugasnya. Faktor lain adalah dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD Desa Linsowu. Faktor mata pencaharian . dengan beragam mata pencaharian anggota BPD yang mayoritas sebagai nelayan.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Linsowu, kiranya Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana yang cukup, untuk operasional anggotanya.
2. Koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa Linsowu, kiranya dapat ditingkatkan, hal tersebut akan menimbulkan cetra yang baik kepada

masyarakat dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, agar dalam pembangunan di Desa ini tidak mengalami hambatan dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Linsowu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*, Penerbit, Bumi Akrasa, Jakarta
- Achmad, 1986, *Komunikasi Masa*, Bina Cipta, Jakarta
- Anomin, 1999, *Keputusanmentri Dalam Negeri No. 65 Pemukaan, Penghapusan Dan Pembangunan Desa*, Jakarta
- Azimutyo, 2008. "pengertian pemerintah dan pemerintahan" artikel, dari Website
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2003. *Reinventing pembangunan. Menata ulang paradigma pembangunan untuk membangun indonesia baru dengan keunggulan global*. PT.Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Gany, Raddy A., 2001. *Demokratisasi Masyarakat Desa: Dinamika Politik Dan Kelembagaan Politik Desa*, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan IV Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM Tanggal 19-22 Juni 2001 DiTenggarong
- Gibson JL, dkk 1964, *Organisasi Dan Manajemen*, PN, Erlangga, Jakarta.
- Indrawijaya Adam, 1984, *Organisasi Dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Prasadj, Buddy, 1992, *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinanya*, Rajawali, Jakarta.
- Rakhmat Jalaluddin, 1994, *Psikologis Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung.
- Sarwono, Sarlito, 1984, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sarwono, 1993, *Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*, Gaja Mada, University Pres Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suwignjo, 1993, *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Strauss, A. Dan Corbin, J., 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syarif, Rusli, 1991. *Teknik manajemen Latihan Dan Pembangunan*. Bandung : Penerbit Angkasa.
- Tjikroamidjojo, Bintoro, 1989, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2003, *pemerintahan desa*, Jakarta.
- Thoha Miftha, 1993, *Perilaku Organisasi*, Rajawali, Jakarta.
- Todaro, Michael, 1986, *Administrasi Pembangunan Desa (Penterjemah: Aminuddin Dan Mursid)*, Rajawali, Jakarta.
- Wolfman, B.R., 1989, *Peranan Kaum Wanita Bagaiman Menjadi Cakap Dan Seimbang Dalam Aneka Peranan (Terjemahan Suratiyah)*, Yogyakarta.
- Wijaya, 2006, *pemerintah desa*, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sutarto, 2006. 2009 *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, HAW, 2000. *Titik Berat Otonomi*, CV. Rajawali, Jakarta
2001. *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
2004. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- S. P. Siagian, 2006. *Fungsi-fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.